

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
INTI SARI	x
ABSTRACT	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi	15
1. Tindak Pidana Korupsi di Indonesia	15
2. Pasal KUHP Yang Diadopsi Dalam UU PTPK	17
3. Esensi Pasal Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .	18
4. Unsur Merugikan Keuangan Negara dan/atau Perekonomian Negara...	20
a. Eksistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK.....	21
b. Instansi Yang Berwenang Melakukan Penghitungan Kerugian Negara	22

B. Tinjauan Umum Tentang Perbankan	24
1. Tindak Pidana Perbankan di Indonesia	24
2. Kategori Tindak Pidana Perbankan	25
3. Kredit Perbankan	26
4. Kredit Macet	27
5. Upaya Penyelesaian Kredit Macet	29
C. Tinjauan Umum Asas Lex Specialist Derogat Legi Generali	31
1. Systematische Specialiteit atau Lex Specialis Sistematis	32
2. Lex Consumen Derogat Legi Consumte	33
D. Tinjauan Umum Pertimbangan Hakim	33
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Jenis dan Sifat Penelitian	36
B. Jenis Data	37
C. Cara dan Alat Pengumpulan Data	39
D. Analisis Data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
A. Pertimbangan Hukum Hakim Yang Menggunakan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penanganan Kredit Macet	41
1. Kasus Posisi.....	41
2. Pertimbangan Hakim	42
3. Kerugian Keuangan Negara Akibat Pemberian Kredit Yang Tidak Sesuai Prosedur	58
a. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Dalam Menangani Kejahatan Manipulasi Data Agunan Dalam Pengajuan Kredit Pada Bank BUMD....	58
b. Penghitungan Kerugian Keuangan Negara.....	65

B. Penerapan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Kredit Macet Di Masa Mendatang	68
1. Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan oleh Nasabah Bank	68
2. Pasal 2 ayat 1 UU PTPK Dicabut Dengan Pasal 603 UU No.1 Tahun 2023	70
3. Pengembalian Kerugian Negara Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Masa Yang Akan Datang	71
BAB V PENUTUP.....	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	79